RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2023

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU
JALAN PENDIDIKAN NO. 5 PUTUSSIBAU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nyalah maka penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan ini merupakan salah satu kewajiban untuk merencanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), efektif, efisien, bersih dan responsif serta akuntabel.

Rencana Kerja Perubahan tahun 2023 ini disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran serta efisiensi/efektifitas anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dan pencapaian kinerja yang telah ditargetkan. Rencana Kerja Perubahan ini juga merupakan upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih tahun 2021-2026 yaitu *"Menuju Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah dan Terampil (HEBAT)"*, dengan didukung beberapa Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Merealisasikan perencanaan yang telah disusun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak terkait, berbagai upaya pembenahan sistem, pengembangan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sesuai

tuntutan tugas dan harapan masyarakat merupakan suatu tugas besar yang harus segera direalisasikan. Demi terwujudnya keberhasilan perencanaan yang telah ditetapkan perlu dukungan semua pihak untuk perbaikan sistem dan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu sehingga akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan yang lebih baik dapat tercapai.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal Juni 2023

Kepala Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu,

Drs. ABDULLAH SANI
Pembina Utama Muda
NIP. 19670315 199403 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu 19

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 23

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 24

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 41

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU 42

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 42

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu 43

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 47

BAB IV PENUTUP 59

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Keberadaan dokumen Rencana Kerja (Renja) tersebut disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sehingga Renja merupakan satu kesatuan yang lengkap terkait dengan ketersediaan dokumen perencanaan untuk perencanaan pembangunan.

Setiap Perangkat Daerah akan berupaya untuk menyusun Renja dengan kualitas yang baik, oleh karena itu salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah tingkat keterkaitan secara konsisten dan sinergis antara muatan materi Renja dengan dokumen perencanaan lainnya secara komperehensif. Sehingga Renja Perangkat Daerah secara konkrit dapat memberikan landasan hukum serta dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen yang tidak terlepaskan dalam rangka mencapai tujuan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renja sesuai dengan peran dan kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu penyelenggaraan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 ini berisi kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara langsung dengan penganggaran sesuai pagu indikatif berdasarkan kerangka kebijakan RKPD Tahun 2023, yang bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana Kerja Perubahan dilakukakan mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, serta adanya penyesuaian dalam pelaksanaan anggaran dengan melakukan efisiensi dan efektifitas anggaran serta mengutamakan pelaksanaan program/kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian kinerja serta pemenuhan layanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyeleggaran Pemerintah Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, SertaTata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028;;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Renja-P Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dimaksudkan sebagai pelaksanaan program dan

kegiatan perpustakaan dan kearsipan selama periode 1 (satu) tahunan yaitu Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Renja-P Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 adalah:

a. Mengefektifkan rumusan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun berjalan dengan mempertimbangkan hal-hal pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
b. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka mendukung pencapaian program Pemerintah Daerah;
c. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien, menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
d. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan perggeseran alokasi anggaran kegiatan;
e. Untuk memberikan arah serta sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Anggaran Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dengan penyerapan anggaran dinas yang ditargetkan 95,15% sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar 99,68% atau sebesar Rp.14.064.444.778,00 (*empat belas milyar enam puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah*) dari total anggaran dinas sebesar Rp.14.109.171.417,00 (*empat belas milyar seratus sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah*

Realisasi anggaran tersebut sedikit mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya (tahun 2021) sebesar 98,99% dari total alokasi anggaran yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu harus mengevaluasi kembali kendala atau penyebab penurunan tingkat penyerapan anggaran yang terjadi dan senantiasa

berusaha untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga seluruh anggaran dapat terserap secara maksimal.

Dalam rangka pemenuhan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan serta untuk menganalisis perencanaan kebutuhan pada Tahun 2023, sangat dibutuhkan evaluasi Renja dengan cara melakukan perbandingan atau membuat sandingan data antara target capaian kinerja Renstra sampai dengan periode akhir Renstra, dibandingkan atau disandingkan dengan data realisasi target dan realisasi kinerja hasil program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai denganTahun 2021
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n) Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-3) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2021	Tingkat Capaian)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.23.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**										
2.23.02	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Persentase perpustakaan yang aktif**	**%**	**3,98**		**2,60**	**2,60**	**100**	**3,36**	**3,36**	**100**
		Jumlah Pemustaka/ pengunjung perpustakaan per tahun (jumlah gemar membaca)	**Orang**	**5.520**		**5.414**	**5.414**	**100**	**5.414**	**5.414**	**100**
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	**Buku**	**5.492**		**5.472**	**5.472**	**100**	**5.472**	**5.472**	**100**
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan	**%**	**0,004**		**0,002**	**0,002**	**100**	**0,002**	**0,002**	**100**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengembangan Perpustakaan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota)**	**Persentase perpustakaan yang aktif**	%	**4,03**		**2,64**	**2,64**	**100**	**3,41**	**3,41**	**100**
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan	5		4	4	100	4	4	100
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar di seluruh Wilayah Kab./Kota sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	21		13	13	100	18	18	100
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Dalam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang dibina dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	1		4	4	100	4	4	100
2.23.02.2.01.06	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	1					1	1	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	800		916	916	100	916	916	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.23.02.2.02	**Pembudayaan gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat**	**%**	**38,25**		**30,1**	**30,1**	**100**	**38,17**	**38,17**	**100**
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan Pendidikan Dasar/khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	20		20	20	100	20	20	100
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun/ dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	1					1	1	
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	23		23	23	100	23	23	100
2.23.02.2.02.04	Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	2					2	2	
2.24.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyerapan anggaran Perangkat Daerah**	%	**95,25**		**95,15**	**95,15**	**100**	**95,15**	**95,15**	**100**
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	%	**100**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	%	**100**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	%	**80**		**80**	**80**	**100**	**80**	**80**	**100**
		Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	%	**100**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	%	**95**		**95**	**95**	**100**	**95**	**95**	**100**
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	%	**100**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.24.01.2.01	**Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daderah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**22**		**22**	**22**	**100**	**22**	**22**	**100**
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8		8	8	100	8	8	100
2.24.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100
2.24.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100
2.24.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100
2.24.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	7		7	7	100	7	7	100
2.24.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3		3	3	100	3	3	100
2.24.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**59**		**59**	**59**	**100**	**59**	**59**	**100**
2.24.01.2.02.01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah DAFTAR Gaji dan tunjangan ASN	Dokumen	14		14	14	100	14	14	100
2.24.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	11		11	11	100	11	11	100
2.24.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	14		14	14	100	14	14	100
2.24.01.2.02.05	Koordinasidan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100
2.24.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.24.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	18		18	18	100	18	18	100
2.24.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**4**		**4**	**4**	**100**	**4**	**4**	**100**
2.24.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100
2.24.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	2		2	2	100	2	2	100
2.24.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100
2.24.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**13**		**13**	**13**	**100**	**13**	**13**	**100**
2.24.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Dokumen	2		2	2	100	2	2	100
2.24.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6		6	6	100	6	6	100
2.24.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2		2	2	100	2	2	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.24.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	3		3	3	100	3	3	100
2.24.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen administrasi Umum**	**Dokumen**			**18**	**18**	**100**	**18**	**18**	**100**
2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dokumen penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dokumen	2		2	2	100	2	2	100
2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dokumen	2		2	2	100	2	2	100
2.24.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dokumen	2		2	2	100	2	2	100
2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dokumen	2		2	2	100	2	2	100
2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dokumen	2		2	2	100	2	2	100
2.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	2		2	2	100	2	2	100
2.24.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dokumen	2		2	2	100	2	2	100
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	2		2	2	100	2	2	100
2.24.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2		2	2	100	2	2	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.24.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dokumen**	**2**		**2**	**2**	**100**	**2**	**2**	**100**
2.24.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dokumen Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100
2.24.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100
2.24.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah**	**Dokumen**	**6**		**6**	**6**	**100**	**6**	**6**	**100**
2.24.01.2.08.01	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah dokumen Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100
2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dokumen	3		3	3	100	3	3	100
2.24.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100
2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100
2.24.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Dokumen**	**3**		**3**	**3**	**100**	**3**	**3**	**100**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dokumen Laporan pelaksanaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dokumen	2		2	2	100	2	2	100
2.24.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah dokumen Laporan pelaksanaan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100
2.24.02	**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase Institusi dengan Standar Kearsipan**	**%**	**38,21**		**17,31**	**17,31**	**100**	**17,31**	**17,31**	**100**
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SKPD yang melakukan Pengelolaan Administrasi Kearsipan Yang Baik**	**%**	**33**		**16**	**16**	**100**	**16**	**16**	**100**
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan arsip Dinamis	Jumlah Institusi yang menciptakan dan menggunakan arsip dinamis	Institusi	55		55	55	100	55	55	100
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan arsip Dinamis	Jumlah dokumen arsip dinamis yang terpelihara	Arsip Tekstual/ Non Tekstual	16		16	16	100	16	16	100
2.24.02.2.01.03	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang akan dilakukan pengawasan internal	Perangkat Daerah	1		1	1	100	1	1	100
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terkelolanya arsip statis**	**%**	**37**		**19**	**19**	**100**	**19**	**19**	**100**
2.24.02.2.02.02	Akuisisi Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang diakuisisi, diolah dan dipelihara	Berkas Arsip	5		5	5	100	5	5	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota**	**Persentase Perangkat Daerah dan desa yang menggunakan akses aplikasi kearsipan**	**%**	**5**		**3**	**3**	100	**3**	**3**	100
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kotra	Jumlah Perangkat Daerah dan Desa yang sudah tertib arsip	Institusi (Desa)	9		3	3	100	3	3	100
2.24.03	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Persentase berkas arsip yang dilindungi dan diselamatkan**	**%**	**14,81**							
2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**Persentase arsip Pemerintah Daerah Kabupaten yang dimusnahkan**	**%**	**1,85**							
2.24.03.2.02.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahu	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	1							
2.24.03.2.02	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	**Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	**%**	**14,81**					**7,41**	**7,41**	**100**
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi arsip Akibat Bencana	Jumlah Perangkat Daerah yang Arsipnya DilakukanEvakuasi, Identifikasi, Pemulihandan Penyimpanan Akibat Bencana	Perangkat Daerah	2					1	1	100

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu sesuai Tabel 2.1, untuk urusan wajib bidang perpustakaan dan kearsipan telah mempunyai program dan indikator program yang cukup jelas. Secara umum pencapaian kinerja tahun 2022 sudah cukup baik, hampir semua target capaian kinerja 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah. Untuk pelaksanaan otonomi daerah tersebut, terdapat urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada Daerah, yang selanjutnya menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi : membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan pengembangan semua kegiatan di bidang perpustakaan dan kearsipan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
b. Pelaksana urusan pemerintah bidang perpustakaan dan kearsipan;
c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah di bidang perpustakaan dan kearsipan;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Adapun pencapaian kinerja maupun hal-hal yang menjadi kekuatan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Adanya peningkatan disiplin dan kinerja;
2. Adanya upaya peningkatan pelaksanaan penataan peraturan perundang- undangan;

3. Adanya upaya pelaksanaan pengidentifikasian terhadap tumpang tindihnya tugas dan fungsi, sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja;
4. Adanya standar pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat dan stake holder lainnya berkepastian dan transparan;
5. Manajemen Sumber Daya Manusia dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan akuntabel;
6. Budaya dan tingkat akuntabilitas kinerja birokrasi semakin meningkat;
7. Penyampaian pelaporan LHKPN dan LHKASN yang tertib;
8. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang kegiatan semakin meningkat, sehingga proses birokrasi menjadi lebih efisien, efektif dan transparan serta memberi kemudahan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendapatkan dan mengakses informasi.

Beberapa permasalahan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut, diantaranya :

1) belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana pelayanan dan perkantoran;
2) terbatasnya alokasi anggaran yang tersedia;
3) terbatasnya tenaga teknis untuk pelayanan perpustakaan dan kearsipan;
4) belum maksimalnya penerapan standar pelayanan minimal bidang pelayanan perpustakaan dan kearsipan.

Penyelesaian terhadap permasalahan tersebut diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan pelayanan perpustakaan dan kearsipan kepada masyarakat serta stake holder lainnya berkaitan dengan pemenuhan pemanfataan pelayanan perpustakaan, serta pemanfaatan arsip sebagai pemenuhan pertanggungjawaban dan akuntabitas.

Urusan perpustakaan dan urusan kearsipan merupakan urusan wajib yang bukan pelayanan dasar. Dalam kerangka urusan ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tugas dan tanggungjawab setara dengan perangkat daerah lainnya, masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya terus berupaya untuk memberikan kinerja pelayanan kepada masyarakat, aparatur, pihak-pihak lainnya yang memerlukan pelayanan perpustakaan maupun pelayanan kearsipan. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
URUSAN PERPUSTAKAAN											
1	persentase pengunjung perpustakaan per tahun			48,93%	51,00%	51,30%	51,00%	51,15%	51,30%	-	
2	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun			5.000 pengunjung	5.300 pengunjung	5.800 pengunjung	5.307 pengunjung	5.870 pengunjung	5.870 pengunjung	-	
3	koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah			7.466 judul	7.566 judul	7.666 judul	5,452 judul	5,452 judul	5.472 judul	-	
URUSAN KEARSIPAN											
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara tertib/baku (OPD berpredikat B dari Hasil Pengawasan Kearsipan)			n/a	n/a	22,22% (6 OPD)	-	-	22,22% (6 OPD)	37,04% (6 OPD)	
2	Persentase Penggunaan Layanan Informasi Kearsipan (Aplikasi SRIKANDI)			n/a	n/a	4 OPD	-	-	4 OPD	10 OPD	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pembentukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 yang memuat memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang pencapaiannya akan diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran maupun indikator kinerja program.

Penyusunan Renstra diselaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Disamping itu penyusunan Renstra juga diselaraskan dengan Renstra K/L yang dalam hal ini adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS) dan Arsip Nasional Republik (ANRI) dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat.

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kapuas Hulu khususnya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

a. Depo arsip sebagai ruangan penyimpanan arsip inaktif/statis belum tersedia. Dengan semakin bertambahnya volume arsip dari perangkat-perangkat daerah yang harus disimpan, sementara tidak tersedianya depo arsip menyebabkan arsip belum dapat dikelola secara optimal;
b. Penerapan pengelolaan arsip berbasis digital serta khasanah arsip masih sangat terbatas;
c. Penyelenggaraan kearsipan masih belum sepenuhnya sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kearsipan;

d. Dana pembangunan kearsipan daerah masih terbatas, saat ini masih terdapat perangkat daerah yang belum memiliki record center sebagai tempat penyimpanan arsip inaktif;
e. Formasi pejabat fungsional Arsiparis masih terbatas pada OPD Teknis Pengelola Arsip Daerah, serta tidak/belum tersedianya fungsional Arsiparis pada setiap OPD, selanjutnya formasi pejabat fungsional Pustakawan masih terbatas pada perpustakaan daerah, masih belum menyeluruh pada perpustakaan sekolah;
f. Ruang layanan perpustakaan masih belum dilengkapi fasilitas ruang audio visual dan fasilitas yang ramah lanjut usia dan difabel serta ruang laktasi;
g. Sarana publikasi yang masif agar perpustakaan milik daerah menjadi rujukan bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu masih kurang, serta penerapan pengelolaan perpustakaan berbasis digital masih sangat terbatas;
h. Koleksi naskah kuno yang ada di masyarakat berlum teridentifikasi dengan baik;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021. Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Terdapat beberapa perubahan (penambahan dan pengurangan) terhadap Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukan perlunya penambahan beberapa kegiatan, perubahan tersebut didasari oleh :

1. Amanat Permendagri 86 Tahun 2017 terkait waktu dan mekanisme perubahan RPJP dan RPJMD;

2. Penyesuaian terhadap RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, yang mengakomodir visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih baru;
3. Adanya perubahan peraturan tentang perubahan regulasi dan peraturan tentang perpustakaan dan kearsipan;
4. Adanya perubahan peraturan tentang penyusunan anggaran keuangan daerah yang juga mempengaruhi pengurangan atau penambahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu di tahun 2023.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022, dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program dan Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Program dan Kegiatan	Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.0)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.0)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.23.02	**Program Pembinaan Perpustakaan**	Kab. Kapuas Hulu				**294.920.413**	**Program Pembinaan Perpustakaan**					**10.699.300.600**	
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengembangan Perpustakaan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota)**	Kab. Kapuas Hulu	**Persentase perpustakaan yang aktif**	**3,41**	%	**169.341.900**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengembangan Perpustakaan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota)**	Kab. Kapuas Hulu	**Persentase perpustakaan yang aktif**	**2,79**	%	**107.590.100**	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	4	Perpustakaan	93.334.400	Pengembangan Perpustakaan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota						tidak dialokasikan karena keterbatasan pagu anggaran
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada saatuan Pendidikan Dasardi seluruh Wilayah Kab./Kota sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan Sesuai Standar Perpustakaan	18	Perpustakaan	49.598.000	Pembinaan Perpustakaan pada saatuan Pendidikan Dasardi seluruh Wilayah Kab./Kota sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan Sesuai Standar Perpustakaan	18	Perpustakaan	23.993.600	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perpustakaan Dalam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang dibina dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	1	Perpustakaan	10.000.000	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perpustakaan Dalam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang dibina dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	4	Perpustakaan	78.424.200	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Orang	10.000.000	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat Daerah Kabupaten/Kota						tidak dialokasikan karena keterbatasan pagu anggaran
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan bahan Pustaka	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	916	Eksemplar	6.409.500	Pengelolaan dan Pengembangan bahan Pustaka	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	916	Eksemplar	5.172.300	
2.23.02.2.02	**Pembudayaan gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Kapuas Hulu	**Persentase pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat**	**38,17**	**%**	**125.578.513**	**Pembudayaan gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Kapuas Hulu	**Persentase pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat**	**38,17**	**%**	**10.591.710.500**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan Pendidikan Dasar/khusus serta Masyarakat	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	20	Lokus	63.942.200	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan Pendidikan Dasar/khusus serta Masyarakat	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	20	Lokus	15.352.000	
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun/ dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Perpustakaan	3.000.000	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun/ dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Perpustakaan	10.527.466.500	Dialokasikan dari usulan DAK Bidang Perpustakaan
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	23	Orang	32.142.000	Pemberian Penghargaan gerakan budaya gemar membaca						tidak dialokasikan karena keterbatasan pagu anggaran
2.23.02.2.02.04	Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2	Perpustakaan	26.494.313	Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2	Perpustakaan	48.892.000	
2.24.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					**3.696.493.400**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					**3.696.493.400**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.24.01.2.01	**Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daderah**	Kab. Kapuas Hulu	**Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**22**	**Dokumen**	**26.024.000**	**Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daderah**	Kab. Kapuas Hulu	**Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**22**	**Dokumen**	**26.024.000**	
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	8.334.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	8.334.200	
2.24.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3.509.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3.509.400	
2.24.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	3.502.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	3.502.800	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.24.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	3.630.800	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokume n	3.630.800	
2.24.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3.324.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokume n	3.324.000	
2.24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Dokumen	1.987.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Dokume n	1.987.000	
2.24.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Dokumen	1.735.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Dokume n	1.735.800	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.24.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Kapuas Hulu	**Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**59**	**Dokumen**	**1.902.208.805**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Kapuas Hulu	**Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**59**	**Dokume n**	**1.902.208.805**	
2.24.01.2.02.01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah DAFTAR Gaji dan tunjangan ASN	14	Dokumen	1.888.382.205	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah DAFTAR Gaji dan tunjangan ASN	14	Dokume n	1.888.382.205	
2.24.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11	Dokumen	2.044.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD	11	Dokume n	2.044.800	
2.24.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14	Dokumen	2.991.600	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14	Dokume n	2.991.600	
2.24.01.2.02.05	Koordinasidan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	2.696.800	Koordinasidan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokume n	2.696.800	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.24.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	2.316.800	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	2.316.800	
2.24.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Dokumen	3.776.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Dokumen	3.776.600	
2.24.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kab. Kapuas Hulu	**Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4**	**Dokumen**	**3.011.600**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kab. Kapuas Hulu	**Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4**	**Dokumen**	**3.011.600**	
2.24.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1.120.600	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1.120.600	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.24.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Dokumen	898.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Dokumen	898.000	
2.24.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Dokumen	993.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Dokumen	993.000	
2.24.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Kapuas Hulu	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**13**	**Dokumen**	**749.578.400**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Kapuas Hulu	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**13**	**Dokumen**	**749.578.400**	
2.24.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	2	Dokumen	373.751.800	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2	Dokumen	373.751.800	
2.24.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	Dokumen	373.751.800	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	Dokumen	373.751.800	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.24.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	Dokumen	1.043.800	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaa n Sistem Informasi Kepegawaian	2	Dokume n	1.043.800	
2.24.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	Dokumen	1.031.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	Dokume n	1.031.000	
2.24.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Kapuas Hulu	**Jumlah Dokumen administrasi Umum**	**18**	**Dokumen**	**414.604.595**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Kapuas Hulu	**Jumlah Dokumen administrasi Umum**	**18**	**Dokume n**	**414.604.595**	
2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Dokumen	3.014.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Dokume n	3.014.000	
2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Dokumen	3.207.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Dokume n	3.207.400	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.24.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Dokumen	1.800.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Dokumen	1.800.000	
2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Dokumen	39.695.695	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Dokumen	39.695.695	
2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Dokumen	10.541.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Dokumen	10.541.500	
2.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	4.620.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	4.620.000	
2.24.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	Dokumen	14.840.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	Dokumen	14.840.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Dokumen	336.254.000	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Dokumen	336.254.000	
2.24.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen	632.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen	632.000	
2.24.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Kapuas Hulu	**Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2**	**Dokumen**	**-**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Kapuas Hulu	**Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2**	**Dokumen**	**-**	
2.24.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Dokumen	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Dokumen	-	
2.24.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Dokumen	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Dokumen	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.24.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Kapuas Hulu	**Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah**	**6**	**Dokumen**	**477.166.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Kapuas Hulu	**Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah**	**6**	**Dokume n**	**477.166.000**	
2.24.01.2.08.01	Penyediaan Surat Menyurat	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Dokumen	1.200.000	Penyediaan Surat Menyurat	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Dokume n	1.200.000	
2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Dokumen	42.160.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Dokume n	42.160.000	
2.24.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Dokumen	5.100.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Dokume n	5.100.000	
2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Dokumen	428.706.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Dokume n	428.706.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.24.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Kapuas Hulu	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**3**	**Dokumen**	**123.900.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Kapuas Hulu	**Terlaksanan ya pemeliharaa n barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**3**	**Dokume n**	**123.900.000**	
2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Laporan pelaksanaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Dokumen	61.950.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Laporan pelaksanaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Dokume n	61.950.000	
2.24.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Laporan pelaksanaan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1	Dokumen	61.950.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen Laporan pelaksanaan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1	Dokume n	61.950.000	
2.24.02	**Program Pengelolaan Arsip**					**241.757.000**	**Program Pengelolaan Arsip**					**196.170.930**	
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Kapuas Hulu	**Persentase SKPD yang melakukan Pengelolaan Administrasi Kearsipan Yang Baik**	**16**	**%**	***152.063.000***	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Kapuas Hulu	**Persentase SKPD yang melakukan Pengelolaan Administrasi Kearsipan Yang Baik**	**16**	**%**	***47.310.000***	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan arsip Dinamis	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Institusi yang menciptakan dan menggunakan arsip dinamis	55	Institusi	*92.230.000*	Penciptaan dan Penggunaan arsip Dinamis						tidak dialokasikan karena keterbatasan pagu anggaran
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan arsip Dinamis	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen arsip dinamis yang terpelihara	16	Arsip Tekstual/ Non Tekstual	*9.223.000*	Pemeliharaan dan Penyusutan arsip Dinamis						tidak dialokasikan karena keterbatasan pagu anggaran
2.24.02.2.01.03	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perangkat Daerah yang akan dilakukan pengawasan internal	1	Perangkat Daerah	*50.610.000*	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perangkat Daerah yang akan dilakukan pengawasan internal	1	Perangkat Daerah	*47.310.000*	
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Kapuas Hulu	**Persentase terkelolanya arsip statis**	**19**	**%**	***38.750.000***	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Kapuas Hulu	**Persentase terkelolanya arsip statis**	**19**	**%**	***31.815.000***	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah arsip statis yang diakuisisi, diolah dan dipelihara	5	Berkas Arsip	38.750.000	Akuisisi Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah arsip statis yang diakuisisi, diolah dan dipelihara	5	Berkas Arsip	31.815.000	
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota**	Kab. Kapuas Hulu	**Persentase Perangkat Daerah dan desa yang menggunakan akses aplikasi kearsipan**	**3**	**%**	***50.944.000***	**Pengelolaan Simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota**	Kab. Kapuas Hulu	**Persentase Perangkat Daerah dan desa yang menggunakan akses aplikasi kearsipan**	**3**	**%**	***117.045.930***	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kotra	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perangkat Daerah dan Desa yang sudah tertib arsip	9	Institusi (Desa)	*50.944.000*	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kotra	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perangkat Daerah dan Desa yang sudah tertib arsip	9	Institusi (Desa)	*117.045.930*	
2.24.03	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**					***77.500.000***	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**					***39.643.000***	
2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	Kab. Kapuas Hulu	**Persentase arsip Pemerintah Daerah Kabupaten yang dimusnahkan**	**1,85**	**%**	***38.750.000***	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**					**-**	
2.24.03.2.02.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahu	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1	Berkas	38.750.000	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahu						tidak dialokasikan karena keterbatasan pagu anggaran
2.24.03.2.02	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	Kab. Kapuas Hulu	**Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	**7,41**	**%**	***38.750.000***	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	Kab. Kapuas Hulu	**Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	**7,41**	**%**	***39.643.000***	
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi arsip Akibat Bencana	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perangkat Daerah yang Arsipnya DilakukanEvakuasi, Identifikasi, Pemulihandan Penyimpanan Akibat Bencana	2	Perangkat Daerah	38.750.000	Evakuasi dan Identifikasi arsip Akibat Bencana	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perangkat Daerah yang Arsipnya DilakukanEvakuasi, Identifikasi, Pemulihandan Penyimpanan Akibat Bencana	1	Perangkat Daerah	39.643.000	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan perencanaan kinerja terkait penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan (tahun 2023) bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu saat ini tidak/ belum terdapat masukan program/ kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan perpustakaan dan kearsipan, maupun dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi ataupun pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan penggabungan perangkat daerah yang didasarkan perumpunan urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan. Dan secara kelembagaan urusan kearsipan dan urusan perpustakaan memiliki instansi pembina tingkat nasional yaitu Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS RI) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkedudukan di Ibukota Jakarta.

Oleh karena itu dalam melakukan telaahan selanjutnya diperlukan analisis terhadap 2 (dua) kategori urusan pemerintahan berkaitan dengan PERPUSNAS RI serta ANRI. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kapuas Hulu berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

3.2.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Disperpusip	Sebagai Faktor	
			Penghambat (-)	Pendorong (+)
(1)	(2)	(	(	(
	Renstra Perpustakaan Nasional RI Tahun 2020-2024			
1.	Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca	Budaya kegemaran membaca masyarakat belum terdapat peningkatan yang signifikan	Daya tarik perpustakan belum tinggi	Urusan Perpustakaan telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai prioritas nasional sebagai bagian penting budaya literasi dalam indeks pembangunan kebudayaan
	Renstra Arsip Nasional RI Tahun 2020-2024			
1.	Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan ditandai dengan meningkatnya kepatuhan penyelenggara negara dan masyarakat peraturan perundang-undangan bidang kearsipan	Ketersediaan dan keberadaan arsip autentik dan arsip bernilai kesejarahan belum efektif	Pengelolaan arsip dinamis belum tertib	Urusan Kearsipan telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai bagian dari agenda Pembangunan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan serta agenda memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional ditandai dengan meningkatnya ketersediaan arsip di unit pengolah, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan		Penyelamatan Arsip kesejarahan belum efektif	
3.	Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan arsip informasi kearsipan yang dilaksanakan oleh unit kearsipan dan lembaga kearsipan	Kualitas pelayanan informasi kearsipan belum memadai	Fasilitas penunjang dan SDM pengelola masih belum optimal	Tersedianya sistem informasi dan implementasi aplikasi SRIKANDI

Telaahan terhadap kebijakan nasional dilakukan berdasarkan Renstra Perpustakaan Nasional (Perpusnas) 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perpusnas 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan
1	Meningkatnya nilai budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	1. Terwujudnya Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Pembangunan Literasi Masyarakat 2. Terwujudnya Perpustakaan yang berstandar Nasional sebagai wahana belajar sepanjang hayat 3. Terwujudnya Layanan Prima Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	A. Program Pengembangan Perpustakaan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional; B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional C. Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional
2	Meningkatnya pelestarian khasanah intelektual budaya bangsa untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri Indonesia	1. Terwujudnya perpustakaan sebagai pelestari khazanah budaya bangsa	

Selanjutnya berdasarkan Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 3.3. yaitu :

Tabel 3.3.
Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan ANRI 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan
1	Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh	1. Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan 2. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional 3. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima 4. Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI	A. Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional B. Program Dukungan Manajemen;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang.

Tujuan umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu adalah mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukan status kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing Misi.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu, adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola dan Layanan Perpustakaan yang optimal, dengan indikator tujuannya adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Dengan target pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebesar 58,33%.
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah, dengan indikator tujuannya adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Dengan target pada tahun 2023 dengan Nilai C.

Sasaran atau Objek Organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi.

Fokus utama penetapan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa strategis terkait juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan **Sasaran**, sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola dan Layanan Perpustakaan yang optimal, dengan indikator sasaran : Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh Masyarakat, dengan target yang akan dicapai pada tahun 2023 sebesar 2,20%**.**
2. Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan indikator sasaran : Predikat SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, target yang akan dicapai pada tahun 2023 adalah predikat "CC".
2. Meningkatnya pengelolaan dan layanan administrasi kearsipan yang baik, dengan indikator sasaran :
   a. Jumlah OPD berpredikat B dari Hasil Pengawasan Kearsipan, dengan target pada tahun 2023 sebanyak 10 OPD.
   b. Persentase Penggunaan Layanan Informasi Kearsipan (Aplikasi SRIKANDI), dengan target pada tahun 2023 sebesar 33,33%.

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, sekaligus merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan beserta indikatornya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Tahun 2023 Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023
2	Mewujudkan Tata Kelola dan Layanan Perpustakaan yang optimal	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			Skor	58,33
			Terwujudnya Tata Kelola dan Layanan Perpustakaan yang optimal	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh Masyarakat	%	2,20
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi			Nilai	C
			Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Predikat SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai	CC
			Meningkatnya pengelolaan dan layanan administrasi kearsipan yang baik	Jumlah OPD berpredikat B dari Hasil Pengawasan Kearsipan	OPD	10
				Persentase Penggunaan Layanan Informasi Kearsipan (Aplikasi SRIKANDI)	%	33,33

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan dan dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integrasi untuk mencapai sasaran kebijakan secara keseluruhan. Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk diopersionalkan. Untuk itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu merumuskan 4 Program yang akan dilaksanakan agar Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan guna pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengacu pada hubungan klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah, maka program dan kegiatan yang disusulkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dalam 5 (lima) tahun disusun berdasarkan program perangkat daerah beserta pagu indikatif pelaksanaannya, serta sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun Program-program tersebut adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pembinaan Perpustakaan;
3. Program Pengelolaan Arsip;
4. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2023, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 4 (empat) program dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran, meningkatnya efektivitas dan efesiensi operasional kantor, serta meningkatnya profesionalisme aparatur. Program pelayanan administrasi perkantoran kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari:

   a) *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*, terdiri dari sub kegiatan:
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   b) *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*, terdiri sub kegiatan:
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
      3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
      4) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
      5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
   c) *Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*, terdiri sub kegiatan:
      1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
      2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
   d) *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*, terdiri sub kegiatan:

1) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

e) *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*, terdiri sub kegiatan:
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
7) Fasilitas Kunjungan Tamu;
8) Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD;

f) *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*, terdiri sub kegiatan:
1) Penyediaan Surat Menyurat;
2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

h) *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*, terdiri sub kegiatan:
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.

2. Program Pengelolaan Arsip

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib pengelolaan administrasi kearsipan secara handal dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga lebih mudah, murah dan praktis serta lebih akurat, cepat dan tepat dalam pengelolaan administrasi kearsipan, program ini dalam pelaksanaannya sekaligus melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan kepada semua institusi untuk mewujudkan pengelolaan tertib administrasi kearsipan, program

pengelolaan arsip ini kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

a) *Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota*, terdiri dari sub kegiatan:
   1) Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota;

b) *Kegiatan Pengelolaan Simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota*, terdiri dari sub kegiatan:
   1) Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kotra.

3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

   Program ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan penyelamatan arsip sehingga tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara agar kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dapat dipenuhi, program pengelolaan arsip ini kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

   a) *Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun*, terdiri dari sub kegiatan:
      1) Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun.

4. Program Pembinaan Perpustakaan

   Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan dan pengembangan tata Kelola dan palayanan perpustakaan melalui upaya pembinaan dan pemanfaataan fasilitas dan prasarana yang tersedia menuju transformasi perpustakaan berbasisi inklusi sosial, program Pembinaan Perpustakaan ini kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

a) *Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengembangan Perpustakaan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota)*, terdiri sub kegiatan:
   1) Pengembangan Perpustakaan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota;
   2) Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar di seluruh Wilayah Kab/Kota sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan;

a) *Kegiatan Pembudayaan gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*, terdiri sub kegiatan:
   1) Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan Pendidikan Dasar/khusus serta Masyarakat;
   2) Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial.

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Kerja, Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu

Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023					Perubahan Rencana Tahun 2023				Sumber Dana
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Target Capaian	Pagu	Sumber Dana	Belanja Operasi	Belanja Modal	Target Capaian	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			**3.564.622.774,00**	**143.894.626,00**		**3.708.517.400,00**		**3.698.705.113,00**	**216.483.126,00**		**3.915.188.239,00**	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			**146.055.400,00**	**121.394.626,00**		**267.450.026,00**		**159.434.400,00**	**115.295.576,00**		**274.729.976,00**	
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**68.276.900,00**	**121.394.626,00**		**189.671.526,00**		**51.285.900,00**	**115.295.576,00**		**166.581.476,00**	
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Kab. Kapuas Hulu	57.525.400,00	121.394.626,00	5	178.920.026,00	Dana Alokasi Umum	34.529.400,00	115.295.576,00	5	149.824.976,00	Dana Alokasi Umum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan Sesuai Standar Perpustakaan	Kab. Kapuas Hulu	10.751.500,00	0	21	10.751.500,00	Dana Alokasi Umum	16.756.500,00	0	21	16.756.500,00	Dana Alokasi Umum
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**77.778.500,00**	**0**		**77.778.500,00**		**108.148.500,00**	**0**		**108.148.500,00**	
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Kab. Kapuas Hulu	30.403.000,00	0	20	30.403.000,00	Dana Alokasi Umum	44.493.000,00	0	20	44.493.000,00	Dana Alokasi Umum
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kab. Kapuas Hulu	47.375.500,00	0	2	47.375.500,00	Dana Alokasi Umum	63.655.500,00	0	2	63.655.500,00	Dana Alokasi Umum
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**3.338.842.374,00**	**22.500.000,00**		**3.361.342.374,00**		**3.389.357.713,00**	**101.187.550,00**		**3.490.545.263,00**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**45.800.500,00**	**0**		**45.800.500,00**		**20.115.700,00**	**-**		**20.115.700,00**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	8.334.200,00	0	8	8.334.200,00	Dana Alokasi Umum	8.334.200,00	0	8	8.334.200,00	Dana Alokasi Umum
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kab. Kapuas Hulu	7.109.500,00	0	1	7.109.500,00	Dana Alokasi Umum	4.709.500,00	0	1	4.709.500,00	Dana Alokasi Umum
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kab. Kapuas Hulu	7.102.800,00	0	1	7.102.800,00	Dana Alokasi Umum	425.000,00	0	1	425.000,00	Dana Alokasi Umum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Kab. Kapuas Hulu	7.897.000,00	0	1	7.897.000,00	Dana Alokasi Umum	5.497.000,00	0	1	5.497.000,00	Dana Alokasi Umum
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Kab. Kapuas Hulu	7.204.000,00	0	1	7.204.000,00	Dana Alokasi Umum	425.000,00	0	1	425.000,00	Dana Alokasi Umum
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu	4.364.000,00	0	7	4.364.000,00	Dana Alokasi Umum	350.000,00	0	2	350.000,00	Dana Alokasi Umum
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	3.789.000,00	0	3	3.789.000,00	Dana Alokasi Umum	375.000,00	0	4	375.000,00	Dana Alokasi Umum
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**2.258.151.228,00**	**0**		**2.258.151.228,00**		**2.411.571.332,00**	**-**		**2.411.571.332,00**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah DAFTAR Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	2.105.320.228,00	0	14	2.105.320.228,00	Dana Alokasi Umum	2.261.991.332,00	0	14	2.261.991.332,00	Dana Alokasi Umum
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kapuas Hulu	137.880.000,00	0	11	137.880.000,00	Dana Alokasi Umum	147.480.000,00	0	11	147.480.000,00	Dana Alokasi Umum
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	4.772.000,00	0	14	4.772.000,00	Dana Alokasi Umum	-	0	14	-	Dana Alokasi Umum
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kapuas Hulu	4.823.000,00	0	1	4.823.000,00	Dana Alokasi Umum	1.250.000,00	0	1	1.250.000,00	Dana Alokasi Umum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu	5.356.000,00	0	18	5.356.000,00	Dana Alokasi Umum	850.000,00	0	18	850.000,00	Dana Alokasi Umum
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			**10.860.000,00**	**0**		**10.860.000,00**		**750.000,00**	**-**		**750.000,00**	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	7.095.000,00	0	2	7.095.000,00	Dana Alokasi Umum	375.000,00	0	2	375.000,00	Dana Alokasi Umum
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	3.765.000,00	0	1	3.765.000,00	Dana Alokasi Umum	375.000,00	0	1	375.000,00	Dana Alokasi Umum
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**58.660.000,00**	**0**		**58.660.000,00**		**24.771.000,00**	**-**		**24.771.000,00**	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	3.583.000,00	0	2	3.583.000,00	Dana Alokasi Umum	300.000,00	0	2	300.000,00	Dana Alokasi Umum
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kapuas Hulu	3.216.000,00	0	3	3.216.000,00	Dana Alokasi Umum	643.000,00	0	3	643.000,00	Dana Alokasi Umum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kapuas Hulu	51.861.000,00	0	3	51.861.000,00	Dana Alokasi Umum	23.828.000,00	0	2	23.828.000,00	Dana Alokasi Umum
Administrasi Umum Perangkat Daerah			**334.076.000,00**	**22.500.000,00**		**356.576.000,00**		**327.555.500,00**	**101.187.550,00**		**428.743.050,00**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dokumen penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	7.015.000,00	0	2	7.015.000,00	Dana Alokasi Umum	2.012.000,00	0	2	2.012.000,00	Dana Alokasi Umum
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	760.000,00	22.500.000,00	2	23.260.000,00	Dana Alokasi Umum	53.615.000,00	101.187.550,00	2	154.802.550,00	Dana Alokasi Umum
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	31.007.500,00	0	2	31.007.500,00	Dana Alokasi Umum	7.514.500,00	0	2	7.514.500,00	Dana Alokasi Umum
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	18.000.000,00	0	2	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum	2.930.000,00	0	2	2.930.000,00	Dana Alokasi Umum
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	10.541.500,00	0	2	10.541.500,00	Dana Alokasi Umum	4.544.000,00	0	2	4.544.000,00	Dana Alokasi Umum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	7.200.000,00	0	2	7.200.000,00	Dana Alokasi Umum	3.600.000,00	0	2	3.600.000,00	Dana Alokasi Umum
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kapuas Hulu	21.000.000,00	0	2	21.000.000,00	Dana Alokasi Umum	14.840.000,00	0	2	14.840.000,00	Dana Alokasi Umum
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	238.552.000,00	0	2	238.552.000,00	Dana Alokasi Umum	238.500.000,00	0	2	238.500.000,00	Dana Alokasi Umum
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**513.104.646,00**	**0**		**513.104.646,00**		**497.754.696,00**	**-**		**497.754.696,00**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kapuas Hulu	1.200.000,00	0	1	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum	1.200.000,00	0	1	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	83.198.646,00	0	3	83.198.646,00	Dana Alokasi Umum	79.148.696,00	0	3	79.148.696,00	Dana Alokasi Umum
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	428.706.000,00	0	1	428.706.000,00	Dana Alokasi Umum	417.406.000,00	0	1	417.406.000,00	Dana Alokasi Umum
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**118.190.000,00**	**0**		**118.190.000,00**		**106.839.485,00**	**-**		**106.839.485,00**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dokumen Laporan pelaksanaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kapuas Hulu	94.240.000,00	0	2	94.240.000,00	Dana Alokasi Umum	28.510.000,00	0	2	28.510.000,00	Dana Alokasi Umum
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah dokumen Laporan pelaksanaan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	23.950.000,00	0	1	23.950.000,00	Dana Alokasi Umum	78.329.485,00	0	1	78.329.485,00	Dana Alokasi Umum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			**22.496.000,00**	**0**		**22.496.000,00**		**24.431.000,00**	**0**		**24.431.000,00**	
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang akan dilakukan pengawasan internal	Kab. Kapuas Hulu	22.496.000,00	0	1	22.496.000,00	Dana Alokasi Umum	24.431.000,00	0	1	24.431.000,00	Dana Alokasi Umum
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			**18.479.000,00**	**0**		**18.479.000,00**		**86.732.000,00**	**0**		**86.732.000,00**	
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah dan Desa yang sudah tertib arsip	Kab. Kapuas Hulu	18.479.000,00	0	9	18.479.000,00	Dana Alokasi Umum	86.732.000,00	0	9	86.732.000,00	Dana Alokasi Umum
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			**38.750.000,00**	**0**		**38.750.000,00**		**38.750.000,00**	**0**		**38.750.000,00**	
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			**38.750.000,00**	**0**		**38.750.000,00**		**38.750.000,00**	**0**		**38.750.000,00**	
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Kab. Kapuas Hulu	38.750.000,00	0	1	38.750.000,00	Dana Alokasi Umum	38.750.000,00	0	1	38.750.000,00	Dana Alokasi Umum

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan semestinya dapat dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perpustakaan. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen yang tinggi serta langkah-langkah nyata dari seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka merealisasikan rencana-rencana yang sudah tertuang dalam bentuk dokumen Renja-P tersebut agar dapat dilaksanakan secara optimal.

Dengan adanya perencanaan kinerja yang baik, tentu akan meningkatkan motivasi kerja seluruh pegawai, dan dapat mendorong terjadinya suatu peningkatan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 memuat program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peprustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Peprustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 ini merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.

Untuk memenuhi perencanaan yang telah disusun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak terkait. Untuk itu, dukungan semua pihak dalam perbaikan sistem dan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu akan sangat diperlukan demi terwujudnya pemenuhan kualitas pelayanan sesuai standar pelayanan minimal, serta meningkatnya akuntanbilitas kinerja yang lebih bertanggungjawab.